

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SELATAN DALAM BIDANG PERTANIAN**

SKRIPSI

Rahmat Saputra

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik
NIM: 180801084



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M /1447 H**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SELATAN DALAM BIDANG PERTANIAN**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Politik

Oleh :

Rahmat Saputra

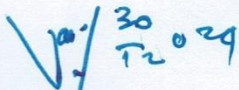
180801084

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 31 Desember 2024

Disetujui untuk Diseminarkan Oleh :

Pembimbing I


Dr. Said Amirulkamar, MM, M.Si
NIP. 196110051982031007

Pembimbing II


Arif Akbar, MA
NIP. 199110242022031001

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SELATAN DALAM BIDANG PERTANIAN**

SKRIPSI

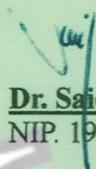
Rahmat Saputra
180801084

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik


Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Januari 2024 M
13 Rajab 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

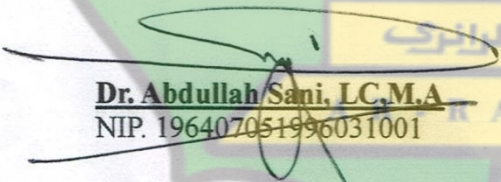
Ketua,


Dr. Saïd Amirulkamal, M.M, M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,


Arif Akbar, M.A
NIP. 19911024202203001

Penguji I,

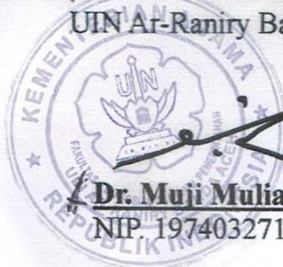

Dr. Abdullah Sani, LC, M.A
NIP. 196407051996031001

Penguji II,


Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005



PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Saputra

NIM : 180801084

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Alamat : Jln. Blang Pidie – Tapak Tuan, Kec Labuhan Haji Barat,
Kab Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2024
Yang Menyatakan,



Rahmat Saputra

ABSTRAK

Pertanian di Kabupaten Aceh Selatan menghadapi permasalahan yang tidak hanya berdampak pada produktivitas tetapi juga keberlanjutan sektor ini, di mana dinamika politik turut memengaruhi penanganannya. Keterbatasan infrastruktur pertanian, seperti saluran irigasi yang tidak optimal, menjadi isu utama, namun alokasi anggaran untuk perbaikannya sering kali bergantung pada prioritas politik pemerintah daerah. Akibatnya, petani harus menghadapi kesulitan tambahan berupa tanah yang kurang subur dan menurunnya produktivitas lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di bidang pertanian dan tantangan-tantangan yang muncul, termasuk pengaruh politik dalam menentukan distribusi sumber daya dan keberpihakan terhadap wilayah tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan pemerintah yang dikemukakan oleh James Anderson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian dilakukan melalui langkah-langkah strategis yang mencakup (1) pengajuan tujuan program yang jelas, (2) penyusunan perencanaan yang terarah, dan (3) penciptaan program yang berkelanjutan, meskipun langkah-langkah ini tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk secara berkala mengukur dan mengevaluasi dampak kebijakan yang dijalankan guna memastikan efektivitasnya, namun tantangan berupa tekanan politik dan kepentingan tertentu dapat mempengaruhi keberhasilan program yang merata. Tantangan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian adalah keterbatasan anggaran yang dipengaruhi oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi yang sering kali diprioritaskan untuk sektor lain yang lebih strategis secara politik, membatasi kemampuan pemerintah dalam menyediakan program pendukung dan bantuan teknis bagi petani secara optimal. Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses jalan menuju lahan pertanian, irigasi yang tidak optimal terutama di wilayah yang bukan menjadi basis politik bupati terpilih, sehingga menghambat produktivitas dan distribusi hasil pertanian. Tantangan lainnya adalah kondisi demografi lahan pertanian yang beragam, dengan kesuburan tanah, luas kepemilikan lahan, dan lokasi yang terpencil menjadi isu yang membutuhkan strategi khusus, namun sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan, terutama jika wilayah tersebut tidak dianggap memiliki nilai politis yang signifikan.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan Pemerintah, Pertanian*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam peneliti sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penelitian Skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Bidang Pertanian”** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Skripsi ini, peneliti mendapat bimbingan, arahan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Kedua Orangtua yang sudah memberikan kasih sayang kepada peneliti dan senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada peneliti.
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Rizkika Lhena Darwin, MA. Ketua Prodi Ilmu Politik dan juga sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi, yang sangat sabar dengan peneliti selama proses bimbingan, serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sangat baik.

6. Ramzi Murziqin, M.A. Sekretaris Prodi Ilmu Politik .
7. Seluruh dosen Program studi Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Terakhir peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri dalam menghadapi susah senangnya perjuangan revisian, terima kasih sudah kuat dan tangguh untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Banda Aceh, 27 Desember 2024
Peneliti,

RAHMAT SAPUTRA
NIM: 180801084



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Implementasi Kebijakan	10
2.2.1 Arti Implementasi Kebijakan Pemerintah.....	10
2.2.2 Indikator Implementasi Kebijakan Pemerintah.....	16
2.2.3 Teori Kebijakan Pemerintah menurut James Anderson.....	23
2.3 Pertanian di Aceh Selatan	23
2.4 Teori Pemerintah Daerah	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5 Informan Penelitian	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum.....	33
B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Bidang Pertanian	38
4.2.1 Mengajukan Tujuan Pogram Pertanian	39

4.2.2 Membuat Perencanaan yang Terarah	43
4.2.3 Menciptakan Pogram Yang Berkelanjutan	46
4.2.4 Mengukur Dan Megevaluasi Dampak Kebijakan	50
C. Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Bidang Pertanian.....	55
4.3.1 Keterbatasan Anggaran	55
4.3.2 Infrastruktur yang Tidak Memadai	60
4.3.3 Demografi Lahan Pertanian	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Subjek Penelitian.....	29
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Aceh Selatan 34

Gambar 4. 2 Logo Kabupaten Aceh Selatan..... 34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanian di Indonesia merupakan sektor vital yang memiliki peran sentral dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Luasnya keanekaragaman geografis dan iklim di seluruh nusantara menciptakan kondisi ideal untuk berbagai jenis komoditas pertanian, seperti padi, kelapa sawit, karet, teh dan rempah-rempah yang telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia¹. Pertanian di Indonesia mencakup sektor subsisten hingga agribisnis besar. Petani kecil masih mendominasi lanskap pertanian dan mengelola lahan dengan metode tradisional.

Pertanian di Provinsi Aceh memiliki peran yang penting dalam struktur ekonomi dan kehidupan masyarakat. Aceh yang terletak di ujung utara pulau Sumatra memiliki kondisi alam yang mendukung kegiatan pertanian. Sawah merupakan bagian penting dari pertanian di Aceh, terutama di dataran rendah yang subur. Padi menjadi komoditas untuk mendukung ketahanan pangan dan menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak petani.²

Pertanian mempunyai peran signifikan dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Selatan. Beberapa komoditas pertanian yang umum di daerah ini meliputi padi, kelapa sawit, karet, cokelat, kopi dan hasil pertanian lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 72% dari total populasi penduduknya aktif terlibat dalam sektor pertanian. Angka tersebut memberikan gambaran jelas mengenai signifikansi sektor pertanian

¹ Bustanul Arifin, *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan Dan Pertanian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020). Hal. 159

² Zulfikiri, *Tabangun Aceh - Edisi 45: Musrembang 2016 Uuntuk Aceh Sejahtera* (Banda Aceh: Tabloid Tabangun Aceh, 2021). Hal. 7

dalam struktur ekonomi dan sosial Kabupaten Aceh Selatan, di mana mayoritas masyarakatnya menemukan sumber kehidupan dan mata pencaharian di lahan pertanian.

Pertanian bukan hanya menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh Selatan, tetapi juga memainkan peran sentral dalam pembentukan identitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pertanian tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan sosial masyarakat. Aktivitas pertanian menunjukkan kekayaan potensial sumber daya alam dan iklim yang mendukung di daerah tersebut. Dengan demikian, sektor pertanian di Aceh Selatan tidak hanya relevan untuk menggambarkan pola penghidupan masyarakatnya, tetapi juga memberikan dasar untuk merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan permasalahan yang dihadapi oleh petani.

Pertanian di Aceh Selatan tidak terlepas dari permasalahan yang memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur pertanian, terutama terkait dengan kurangnya irigasi yang memadai. Musim kemarau dapat menjadi tantangan serius bagi petani karena tanah yang kurang subur akibat minimnya pasokan air. Permasalahan irigasi juga dapat mencerminkan melemahnya keterlibatan pemerintah dalam bidang pertanian. Menurut penelusuran yang dilakukan oleh Saputra (2023) Desa Pantan Pantan Pawoh di Kecamatan Labuhan haji Barat sudah mengalami 7 kali gagal panen karena kekeringan, yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem irigasi di daerah tersebut. Sistem

irigasi tersebut sudah tidak berfungsi selama sekitar 3,5 tahun atau selama tujuh masa tanam padi. Ada 27 hektar area pertanian, namun hanya sekitar 14 hektar yang dapat memperoleh pasokan air yang mencukupi, sedangkan sisanya mengalami kekeringan akibat tidak berfungsinya sistem irigasi (Antaraneews.com)³.

Masalah lain yang dihadapi oleh petani di Aceh Selatan adalah ketidakpastian harga. Fluktuasi harga komoditas pertanian dapat memberikan tekanan finansial pada petani, terutama jika mereka tidak memiliki akses yang memadai ke informasi pasar. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam seperti tanah dan air juga menjadi tantangan, dengan risiko degradasi lingkungan akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Peningkatan produktivitas dan efisiensi tersebut dapat dilakukan dengan implementasi kebijakan pemerintah pada sektor pertanian.

Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan merupakan langkah krusial untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Kebijakan pemerintah guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan mencapai keberlanjutan lingkungan.⁴ Tujuan implementasi kebijakan pemerintah adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup, memastikan keadilan sosial, memperkuat keamanan nasional, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik⁵.

³ Risky Hardian Saputra. Petani Aceh Selatan tujuh kali gagal tanam akibat irigasi tak fungsi, begini penjelasannya. Dikutip dari: <https://aceh.antaranews.com>. 14 Mei 2023

⁴ Herliata. *Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Alpirin, 2020), hal. 4.

⁵ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta CV. 2015), hal. 29.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pertanian menunjukkan upaya serius untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan masyarakat. Seiring dengan visi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintah telah merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendukung para pelaku di sektor pertanian. Beberapa inisiatif utama termasuk penyediaan subsidi pupuk, benih unggul, dan bantuan alat pertanian. Program pelatihan dan pendampingan teknis juga diperkenalkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan praktik pertanian yang lebih efisien.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian di Aceh Selatan masih menunjukkan beberapa ketidakoptimalan yang perlu diperhatikan. Meskipun telah ada upaya untuk mendukung petani melalui program-program pembangunan dan insentif, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Salah satu isu utama adalah ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, di mana beberapa petani, terutama yang berada di wilayah terpencil masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan, informasi teknis, dan infrastruktur pertanian yang memadai.

Kebijakan irigasi di Kabupaten Aceh Selatan diatur untuk memastikan pengelolaan dan distribusi air irigasi yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung pertanian lokal. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, kebijakan ini mencakup pengembangan infrastruktur irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, dan partisipasi aktif masyarakat melalui kelompok tani dalam pengelolaan sistem irigasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air irigasi dengan membangun bendungan dan saluran.

Irigasi di Desa Panton Pawoh masih terdapat berbagai permasalahan. Permasalahan meliputi aspek-aspek seperti konstruksi infrastruktur yang tidak memenuhi standar teknis, distribusi air yang tidak merata, atau ketidakmampuan sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan air selama musim tanam. Akibatnya, petani di Desa Panton Pawoh menghadapi kesulitan dalam memperoleh air yang cukup untuk mengairi lahan mereka, yang berdampak negatif pada hasil panen dan kesejahteraan ekonomi mereka. Situasi ini memerlukan tindakan korektif yang melibatkan evaluasi dan penyesuaian sistem irigasi agar sesuai dengan peraturan kabupaten, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dan kabupaten untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi irigasi di wilayah tersebut.

Permasalahan pertanian sering kali berpusat pada kurangnya prioritas terhadap sektor ini dalam agenda kebijakan daerah, meskipun pertanian menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Salah satu isu utama adalah alokasi anggaran yang minim untuk mendukung program-program pertanian yang inovatif dan berkelanjutan, yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kurangnya sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap distribusi bantuan pertanian, seperti pupuk bersubsidi dan alat pertanian, menimbulkan ketimpangan di tingkat petani dan memicu keluhan tentang ketidakadilan dalam implementasi kebijakan. Kurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan tani dan sistem irigasi, juga memperburuk situasi, terutama bagi petani di wilayah terpencil. Dinamika politik daerah menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan sektor pertanian yang efektif, sehingga memerlukan komitmen bersama dari semua pihak

untuk memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan petani.

Menurut pengamatan peneliti, sistem irigasi yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat di desa Pantan Pawoh sering kali tidak mampu mencukupi kebutuhan air untuk seluruh lahan sawah. Irigasi ini mengandalkan sumber air dari sebuah sungai kecil yang alirannya tidak stabil, terutama pada musim kemarau. Ketika pasokan air menurun, air yang tersedia tidak cukup untuk mengairi semua sawah secara merata. Hal ini menyebabkan beberapa petani harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan air, sementara petani lain mungkin tidak mendapatkan air sama sekali. Kondisi ini diperburuk oleh infrastruktur irigasi yang kurang memadai, dengan saluran-saluran air yang tidak terpelihara dengan baik dan banyak mengalami kebocoran.

Ketidakcukupan air ini seringkali menjadi sumber konflik antar warga desa, karena tidak ada aturan yang jelas mengenai pembagian air irigasi. Petani yang berada di hulu seringkali mengambil lebih banyak air, meninggalkan sedikit atau tidak ada air bagi mereka yang berada di hilir. Ketegangan ini meningkat karena setiap petani merasa berhak untuk mendapatkan air demi kelangsungan tanaman mereka, tanpa ada panduan atau regulasi yang mengatur alokasi air secara adil. Dalam beberapa kasus, konflik ini bahkan menyebabkan perselisihan fisik dan merusak hubungan sosial sesama petani. Penelitian ini menyoroti pentingnya adanya kebijakan dan manajemen irigasi yang lebih baik, termasuk pembentukan aturan yang jelas dan adil untuk penggunaan air irigasi guna mengurangi konflik dan memastikan distribusi air yang lebih merata.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Bidang Pertanian”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian?
2. Bagaimana tantangan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kebijakan publik dan implementasinya di sektor pertanian. Penelitian ini dapat memperkaya teori implementasi kebijakan dengan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Aceh Selatan, diimplementasikan dalam bidang pertanian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di bidang pertanian. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang tidak memadai, dan pengelolaan sumber daya yang kurang optimal. Selain itu, penelitian ini dapat membantu para pemangku kepentingan, termasuk petani, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memahami peran mereka dalam mendukung kebijakan pemerintah, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.



BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian Syawal dkk, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemerintah kota Makassar tidak memiliki Peraturan Daerah (PERDA) khusus yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar masih ditahap proses identifikasi kepemilik lahan pertanian yang ada di Kota Makassar dan masih di tahap penganggaran serta penyusunan rancangan pengadaan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar yang akan dimasukkan dalam persiapan peraturan daerah baru Kota Makassar.⁶

Kedua, Penelitian Wulandari, dkk hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: (i) instansi terkait belum melaksanakan tiga strategi yang tercantum dalam Peraturan Daerah karena kebijakan LP2B masih dalam proses identifikasi; (ii) faktor pendukung implementasi kebijakan adalah disposisi, sementara faktor penghambatnya meliputi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.⁷

⁶ Mufidah, Lailly. "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Petani Mandiri (PPM)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1.7 (2020): 1443-1448.

⁷ Wulandari, Dian Ayu, and Amni Zarkasyi Rahman. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032)." *Journal of Public Policy and Management Review* 6.2 (2017): 696-708.

Ketiga, penelitian Irawan, Peran Pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertanian pala di Kab. Aceh Selatan memberikan gambaran tentang penyuluhan bahwa metode penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat adalah sistem laku (Latihan dan Kunjungan) dan yang menjadi kendala dalam penyuluhan adalah adanya Keterbatasan jumlah petugas penyuluh yang turun kelapangan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Peran pemerintah peran pemerintah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung sektor Pertanian pala melalui kepala sarana dan prasarana memberikan gambaran tentang penyediaan sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian pala bahwa proses penyediaan sarana dan prasarana.⁸

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Arti Implementasi Kebijakan Pemerintah

Implementasi kebijakan pemerintah diartikan sebagai sebuah keputusan, tindakan dan langkah-langkah hukum yang rancang oleh pemerintah dan pemangku kepentingan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam lingkungan sosial demi mencapai tujuan tertentu. Dalam kebijakan pemerintah terdiri dari berbagai kebijakan, hukum, peraturan, dan program-program yang dikembangkan dan diterapkan oleh pemerintah pada berbagai tingkatan, seperti tingkat nasional, regional, atau lokal.⁹

Kebijakan pemerintah merupakan landasan yang sangat esensial dalam sebuah negara. Kebijakan pemerintah bisa diinterpretasikan sebagai sebuah konsep yang melibatkan proses atau sistem yang dilakukan oleh pemerintah atau

⁸ Irawan, Hendri. *Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Pala*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2022.

⁹ Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 45

entitas-entitas administratif untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan tindakan demi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu tertentu¹⁰. Kebijakan pemerintah membentuk sebuah dinamika yang kompleks, di mana terjadi interaksi dan hubungan yang tak terpisahkan antara entitas-entitas administratif tersebut dengan lingkungan sekitarnya.¹¹

Kebijakan pemerintah dapat dijelaskan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan ini memiliki karakteristik yang mempengaruhi dan membutuhkan partisipasi masyarakat, terlepas dari apakah pemerintah sedang melakukan suatu kegiatan atau tidak¹². Proses pembuatan kebijakan pemerintah melibatkan berbagai elemen, seperti analisis kebijakan, penelitian, pengumpulan data, konsultasi pemerintah, dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, efisien, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kebijakan pemerintah melibatkan serangkaian proses dengan melakukan identifikasi masalah-masalah sosial, mengadakan penelitian dan analisis, mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan, dan membuat keputusan berdasarkan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan kebijakan pemerintah adalah untuk mempromosikan kepentingan pemerintah, meningkatkan

¹⁰ Nawawi, Ismail. *Public Policy, Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek* (Surabaya: PMN, 2019), hal. 78.

¹¹ Nugroho, Riant Dwijodijoto. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2020), hal, 138.

¹² Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta. 2019), hal, 86

kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi kebutuhan dan keprihatinan masyarakat¹³.

Kebijakan pemerintah mencakup dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, transportasi, kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, dan keamanan pemerintah. Kebijakan pemerintah menetapkan pedoman, standar, dan aturan yang harus diikuti oleh individu, organisasi, dan lembaga, dan seringkali melibatkan alokasi sumber daya, regulasi perilaku, dan penyediaan layanan pemerintah.¹⁴ Penerapan kebijakan pemerintah adalah proses yang tidak hanya terjadi sekali, tetapi berlangsung secara berkelanjutan¹⁵. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang meliputi pemantauan, penilaian hasil, dan pengambilan tindakan untuk membuat penyesuaian atau melakukan reformasi yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah memastikan efektivitas dan responsivitas kebijakan terhadap perubahan keadaan yang terjadi di dalam suatu negara atau wilayah tertentu.

Kebijakan pemerintah selalu memainkan peran yang sangat penting mengatur suatu wilayah. Kebijakan berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan dengan maksud untuk mengontrol batasan perilaku sosial menjadi lebih baik dan terarah. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen yang kuat dalam membentuk lanskap kehidupan masyarakat¹⁶. Dalam penerapan kebijakan pemerintah, pemerintah atau

¹³ Putra, Fadillah. *Partai Politik dan Kebijakan Publik terhadap implementasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2021), hal. 192.

¹⁴ Murdiningsih. 2014. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Dinas Kota Manado. *Jurnal Administrasi Politik*, (online), Vol 2, No 3, (<http://ejournal.unsrat.untan.ac.id>), diakses 5 Juli 2023.

¹⁵ Abdul Wahab, Silichin. *Pengantar Analisis Publik*. (Universitas Muhammadiyah: Malang Press. 2018), hal. 21.

¹⁶ Bintoro, Tjokroamidjojo. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: Pustaka LP3ES. 2023), hal. 76.

stakeholder terkait bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pelaksanaan langkah-langkah konkret, termasuk mengalokasikan sumber daya, mengorganisasi struktur administrasi, dan menyusun mekanisme pelaksanaan yang efisien.¹⁷

Konsep kebijakan pemerintah sebagaimana A. Hoogerwert melihat bahwa kebijakan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah negara¹⁸. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah memiliki dampak yang signifikan dalam mengatur dan mengendalikan tindakan pemerintah, serta mempengaruhi arah dan keputusan politik yang diambil. Disisi lain, kebijakan pemerintah mencerminkan prioritas, nilai-nilai, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menangani berbagai masalah sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat.¹⁹

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial demi kepentingan masyarakat, dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan, terdapat empat hal penting yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan tersebut, yaitu *pertama*, kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakat secara umum. Hal ini mencakup upaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan akses

¹⁷ Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. (Yogyakarta: UGM Press. 2021), hal. 78

¹⁸ Darmawan Edy. *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*. (Semarang: BP UNDIP. 2023), hal. 125.

¹⁹ Evita Eka, Bambang Supriyono, Imam Hanafi. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 1, No. 5

yang lebih baik terhadap layanan pemerintah, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.²⁰

Kedua, kebijakan harus mewujudkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan tersebut meliputi kepatuhan terhadap hukum, terciptanya keadilan sosial, serta memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk mencapai prestasi dan kreativitasnya.²¹ *Ketiga*, kebijakan harus memastikan partisipasi aktif masyarakat. Artinya, kebijakan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perumusan masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Partisipasi tersebut meliputi melibatkan masyarakat dalam diskusi, konsultasi, dan proses pengambilan keputusan. *Keempat*, kebijakan harus mengutamakan pengembangan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar pembangunan yang dilakukan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan generasi mendatang.²²

Pada hakikatnya, kebijakan pemerintah harus diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum melalui upaya meningkatkan kesejahteraan, akses terhadap layanan pemerintah, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, kebijakan pemerintah juga mencerminkan prinsip keadilan, termasuk kepatuhan terhadap hukum, terciptanya keadilan sosial, dan memberikan peluang yang adil bagi setiap individu²³. Partisipasi aktif

²⁰ Muhadjir, Noeng. *Unsur Perancangan Dalam Arsitektur Lanskap*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2023), hal. 64

²¹ Keban, Yeremias, T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. (Yogyakarta: Penerbit Gaya Media. 2022), hal. 114

²² Nadia Sasmita, Wijayanti. *Pengertian, Jenis-jenis, dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik*. (Bandung: Rajawali Press. 2022), hal. 78

²³ Putra, Fadilah. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik Dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

masyarakat juga menjadi penting dalam kebijakan, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam perumusan masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. *Terakhir*, kebijakan harus memprioritaskan pengembangan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan generasi mendatang.²⁴

Kebijakan pemerintah lebih menekankan pada pentingnya pengambilan keputusan dan tindakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, serta mengakui kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Konsep ini menekankan untuk membantu dalam memahami pentingnya analisis kebijakan yang mendalam, pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal dalam pembuatan kebijakan, serta peran yang dimainkan oleh kebijakan pemerintah dalam membentuk dinamika politik dan sosial suatu negara.²⁵

Kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh dan dampak yang luas, baik pada individu, kelompok masyarakat, sektor industri, lingkungan, maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul, baik secara positif maupun negatif, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut berada dalam kerangka hukum yang tepat.²⁶ Selain itu, kebijakan pemerintah juga merupakan proses yang dinamis, yang dapat berubah seiring waktu dan perkembangan masyarakat. Pemerintah perlu mengikuti perkembangan yang terjadi di

²⁴ Slamet, M. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. (Bogor: IPB Press. 2022), hal. 79.

²⁵ Sumarto, Sj Hetifah. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. (Jakarta: Yayasan obor Indonesia. 2019), hal. 65

²⁶ Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. (Yogyakarta: Media Pressindo. 2022), hal, 141

masyarakat, mengevaluasi kebijakan yang ada, dan menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berubah.²⁷

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah merupakan mekanisme yang kompleks dan penting dalam menjalankan tugas pemerintah untuk merespon masalah-masalah masyarakat. Kebijakan pemerintah mencakup pemahaman, interpretasi, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah serta mencapai tujuan yang diharapkan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan. Kebijakan memiliki peran penting dalam pengolahan dalam sebuah negara, wilayah atau organisasi serta pengambilan keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kebijakan juga berfungsi sebagai sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2.2.2 Indikator Implementasi Kebijakan Pemerintah

Indikator kebijakan pemerintah merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi oleh pemerintah. Teori ini mencakup berbagai pendekatan dan perspektif yang membantu dalam analisis dan pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan dan pengaruhnya terhadap masyarakat, ekonomi, dan institusi. Menurut Charles O. Jones yang dikutip dalam Wirawan

kebijakan pemerintah dapat diuraikan menjadi beberapa komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu:²⁸

1. Goal atau tujuan yang diinginkan

Dalam konteks ini, tujuan kebijakan pemerintah bisa meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, tujuan kebijakan adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat dalam hal kesejahteraan dan kualitas hidup.²⁹

Selain itu, tujuan kebijakan pemerintah juga bisa berkaitan dengan perbaikan kondisi ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri. Dalam hal ini, tujuan kebijakan adalah untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara atau komunitas.³⁰

Selanjutnya, tujuan kebijakan pemerintah juga dapat berkaitan dengan perubahan dalam ranah politik. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, atau memperbaiki sistem tata kelola negara.³¹ Dalam hal ini, tujuan kebijakan adalah untuk mencapai perubahan yang positif dalam dinamika politik,

²⁸ Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2020), hal. 201

²⁹ AR. Mustopadidjaya. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, (Jakarta: LAN. 2022). Hal. 112.

³⁰ Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019), hal, 217

³¹ Wibawa, Samudra. *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hal. 72

termasuk meningkatkan partisipasi aktif warga negara dan memastikan kualitas demokrasi yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemerintah sangat bergantung pada konteks dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah. Tujuan tersebut mencerminkan harapan dan aspirasi untuk mencapai perbaikan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

2. Plans atau proposal

Dalam teori kebijakan pemerintah, langkah-langkah konkret dan rinci yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan disebut sebagai proposal kebijakan. Proposal kebijakan ini mencakup strategi, metode, kebijakan, atau tindakan yang spesifik yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks kebijakan yang sedang diperdebatkan atau direncanakan. Sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan, proposal kebijakan bertindak sebagai alat yang membantu merumuskan pendekatan yang jelas dan terukur dalam mencapai tujuan kebijakan. Proposal ini dapat berisi serangkaian langkah-langkah konkret yang akan diambil, termasuk alokasi sumber daya, implementasi kebijakan, pengawasan, dan evaluasi hasil.³²

Selain itu, proposal kebijakan juga berperan penting dalam mengkomunikasikan rencana tindakan kepada pemangku kepentingan dan pihak yang terlibat dalam proses kebijakan. Dengan merinci strategi, metode, kebijakan, atau tindakan yang akan diambil, proposal kebijakan memberikan kerangka kerja yang jelas dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.³³ Dalam teori kebijakan pemerintah, proposal kebijakan merupakan salah satu tahap kritis dalam siklus kebijakan, yang melibatkan identifikasi masalah, perumusan solusi, dan

³² Syafiie Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung , Refika Aditama, 2020), hal. 189

³³ Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 2021), hal. 17

pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah konkretnya. Proposal kebijakan ini didasarkan pada analisis kebijakan yang mendalam, penelitian, dan pemahaman yang baik tentang konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang relevan.

3. Program

Teori kebijakan pemerintah mengemukakan berbagai perspektif dan kerangka pemikiran untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan kebijakan pemerintah. Teori ini menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan pemerintah seringkali terjadi secara bertahap dan melibatkan serangkaian perubahan kecil yang saling terkait dan berkelanjutan. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam mencapai tujuan kebijakan pemerintah juga dapat diinterpretasikan sebagai langkah-langkah inkremental yang dilakukan dalam konteks kebijakan yang lebih luas.³⁴

Program-program kebijakan pemerintah yang diterapkan melibatkan alokasi sumber daya yang meliputi anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur. Pengalokasian sumber daya ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu, organisasi struktur administrasi yang tepat juga diperlukan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk pembentukan tim kerja, delegasi tugas, dan koordinasi antar unit kerja.³⁵

Implementasi tindakan yang diperlukan dalam konteks kebijakan pemerintah juga mencakup serangkaian langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk

³⁴ Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, (Jogjakarta, Gajahmada University Press.2020), hal. 142.

³⁵ Ali, Farid dan Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2022), hal. 32

menerapkan kebijakan tersebut di lapangan. Hal ini melibatkan aktivitas seperti penyusunan pedoman operasional, pelatihan staf, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Implementasi yang baik dan berhasil merupakan faktor krusial dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah.³⁶

Dalam teori kebijakan pemerintah, proses implementasi dan pelaksanaan kebijakan dilihat sebagai tahap kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Aspek alokasi sumber daya, organisasi struktur administrasi, dan implementasi tindakan yang diperlukan menjadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan dikelola dengan baik agar tujuan kebijakan pemerintah dapat tercapai secara efektif.

4. Decision atau keputusan

Dalam konteks teori kebijakan pemerintah, tindakan atau keputusan yang diambil dalam kebijakan pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang meliputi menentukan tujuan, merumuskan rencana, melaksanakan program, serta mengevaluasi hasilnya³⁷. Keputusan yang diambil dalam kebijakan pemerintah didasarkan pada proses pembuatan keputusan yang sistematis dan berlandaskan pada analisis data, informasi yang relevan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta pertimbangan berbagai faktor yang terkait.

Proses pembuatan keputusan dalam kebijakan pemerintah sering kali melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi dan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi, pengumpulan dan analisis data yang relevan, serta penelaahan literatur atau penelitian terkait. Selain itu, konsultasi dengan

³⁶ Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pancur Siwa, 2021), hal. 902

³⁷ Mufiz, Daman, *Prinsip Perumusan Dalam Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 17

pemangku kepentingan yang terlibat juga menjadi langkah penting dalam menghimpun pandangan, masukan, dan perspektif yang beragam. Hal ini membantu memperkaya pemahaman tentang masalah dan potensi dampak dari kebijakan yang akan diambil.³⁸

Selanjutnya, dalam proses pembuatan keputusan, pemangku kepentingan juga akan terlibat dalam tahap evaluasi dan penilaian terhadap rencana dan program yang dijalankan. Evaluasi ini melibatkan pemantauan terhadap hasil yang dicapai, pengukuran efektivitas dan efisiensi, serta analisis terhadap dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, atau perluasan yang mungkin diperlukan dalam kebijakan yang diterapkan.³⁹

Selain itu, dalam teori kebijakan pemerintah, proses pembuatan keputusan juga diarahkan oleh prinsip akuntabilitas dan transparansi. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan berdasarkan pada informasi yang dapat diakses oleh pemerintah. Transparansi dalam proses pembuatan keputusan memungkinkan masyarakat untuk memahami dan terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi mereka.

Dalam keseluruhan proses ini, teori kebijakan pemerintah memberikan kerangka konseptual dan metodologis yang membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Dengan mempertimbangkan data, informasi, konsultasi, serta pertimbangan

³⁸ Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020), hal. 15.

³⁹ Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hal. 117

berbagai faktor yang relevan, pengambilan keputusan dalam kebijakan pemerintah dapat menjadi lebih efektif, responsif, dan berlandaskan pada analisis yang cermat.

5. Efek

Efek yang timbul dari implementasi program kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam analisis kebijakan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan konsep dampak kebijakan yang merupakan salah satu aspek kunci dalam teori kebijakan pemerintah. Dampak tersebut dapat muncul sebagai hasil dari tindakan yang diambil dalam pelaksanaan program kebijakan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, dampak tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai dampak primer yang langsung terkait dengan tujuan yang diinginkan, maupun dampak sekunder yang timbul sebagai konsekuensi yang tidak terduga dari pelaksanaan program tersebut.

Dalam teori kebijakan pemerintah, dampak kebijakan menjadi fokus penting karena memberikan gambaran tentang hasil konkret yang dicapai melalui implementasi kebijakan. Analisis dampak kebijakan membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program kebijakan dan memahami efek yang ditimbulkannya pada berbagai aspek masyarakat.

Dengan memahami konsep dampak kebijakan, analisis kebijakan pemerintah dapat melibatkan evaluasi mendalam terhadap efek yang dihasilkan oleh implementasi program kebijakan. Ini membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan kebijakan yang ada, serta memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan dapat berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas.

2.2.3 Teori Kebijakan Pemerintah menurut James Anderson

James Anderson, seorang pakar kebijakan publik yang dikutip dalam karya Dydiet Hardjito mengidentifikasi tahapan dalam proses kebijakan publik. Tahap-tahap ini memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana suatu kebijakan dipahami, dirancang, dan dijalankan dalam konteks kebijakan publik.⁴⁰

1. Penentuan Kebijakan: Pada tahap ini, dipilihlah opsi kebijakan yang dianggap paling sesuai dan efektif untuk mengatasi masalah yang ada. Keputusan ini melibatkan pertimbangan antara berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya, dukungan politik, dan dampak pada masyarakat.
2. Implementasi Kebijakan: Tahap ini melibatkan penerapan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat. Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi yang baik, alokasi sumber daya yang memadai, serta pemahaman dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

2.3 Pertanian di Aceh Selatan

Aceh Selatan, sebagai wilayah agraris yang subur, memiliki berbagai jenis pertanian yang mencerminkan keberagaman sumber daya alam dan keanekaragaman budaya masyarakatnya. Berikut adalah beberapa jenis pertanian yang umum di Aceh Selatan:

⁴⁰ Hardjito, Dydiet, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, (Raja GraindoPersada, Jakarta, 2013), hal, 11.

1. Padi

Padi merupakan tanaman pangan utama di Aceh Selatan. Sawah yang melimpah memungkinkan petani untuk membudidayakan padi dengan berbagai varietas dan metode pertanian.

2. Perkebunan

Sektor perkebunan juga berkembang pesat di Aceh Selatan. Tanaman perkebunan seperti kopi, kelapa, dan karet ditanam secara luas. Produksi kopi Aceh terkenal karena kualitasnya yang tinggi.

3. Hortikultura

Tanaman hortikultura, seperti sayuran dan buah-buahan, juga ditanam di Aceh Selatan. Kondisi iklim yang mendukung memungkinkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman hortikultura dengan baik.

4. Pertanian Tanaman Pangan Lainnya

Selain padi, tanaman pangan lain seperti jagung, ubi jalar, dan kedelai juga dapat ditemukan di kebun-kebun masyarakat.

2.4 Teori Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan otonomi daerah. Undang-undang ini menegaskan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai kerangka dasar untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan. Melalui prinsip desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, yang

diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah, yang mencakup gubernur, bupati, dan wali kota, bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, terdapat pembagian urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren, yang menjadi inti otonomi daerah, dibagi lagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sementara urusan pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, seperti pariwisata dan pertanian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan otonomi daerah agar tetap sejalan dengan tujuan nasional. Pengawasan ini dilakukan melalui instrumen hukum, anggaran, dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, di mana pemerintah provinsi bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengawasi dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam implementasinya, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan

potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerangka hukum ini, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional yang berbasis otonomi dan aspirasi lokal.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau masalah secara mendalam dan komprehensif melalui pendekatan yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang dalam tentang fenomena yang diteliti, menggali pandangan dan pengalaman individu, serta mengungkap hubungan kompleks antara variabel-variabel yang ada⁴¹.

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Implementasi Kebijakan

No	Dimensi	Indikator
1	Pogram	a. Peraturan b. Arah Kebijakan
2	Perencanaan	a. Penentuan/ Pendapat b. Pendapatan

Sumber: Numino (2022:6)

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Implementasi Kebijakan

No	Dimensi	Indikator
1		a. Peraturan b. Arah Kebijakan
2	Kendala	a. Dampak Kebijakan b. Evaluasi Kebijakan

Sumber: Numino (2022:6)

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Administratif. (Jakarta. Rineka Cipta, 2018), hal. 32

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian yaitu proses pelaksanaan kebijakan dan berbagai hambatan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan mampu diterapkan secara efektif di lapangan, serta mengidentifikasi kendala-kendala utama yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan. Alasan memilih lokasi penelitian di Aceh Selatan karena Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan periode Bupati Tgk. Amran telah merumuskan kebijakan tentang pertanian, namun sejumlah permasalahan di Aceh Selatan dalam bidang pertanian ditemukan, seperti permasalahan irigasi, gagal panen, konflik petani, dan lain-lain.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian terdapat dua jenis sumber data yang dapat digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.⁴²

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tersebut.⁴³ Dalam penelitian ini sumber data utama diperoleh dari wawancara dengan informan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti Dinas Pertanian, Kepala BPP dan petani. peran pengawas irigasi, hambatan dalam pengawasan, dan persepsi stakeholders terkait.

⁴² Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Akfabeta, 2019), hal. 26.

⁴³ Moh Nazi. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2023), hal. 83.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, namun dapat digunakan oleh peneliti dalam penelitian mereka⁴⁴. Dapat sekunder diperoleh melalui laporan, dokumen kebijakan, peraturan daerah, atau dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan terkait dengan kebijakan dalam bidang pertanian.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang diminta keterangan atau pendapat sesuai dengan data yang diperlukan⁴⁵. Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian dikenal dengan subjek penelitian. Adapun informan penelitiannya adalah:

Tabel 3. 1
Subjek Penelitian

No	Subjek	Jumlah
1	Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan	1
2	Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Labuhanhaji Barat	1
3	Kejrun Blang Desa Pantong Pawoh	2
4	Petani	5

Sumber: Olahan penulis 2024

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian karena data yang dikumpulkan menjadi dasar bagi analisis dan interpretasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁴⁴ Burhan Burgin. *Analisa Data penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2023), hal. 32.

⁴⁵ Soenarko, *Public policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya. (Erlangga University Press, 2020), hal. 201.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung perilaku, interaksi, atau situasi yang terjadi dalam konteks alamiah. Langkah-langkah dalam observasi dimulai dengan menentukan fokus observasi, seperti perilaku, interaksi, atau aktivitas tertentu yang ingin diamati. Peneliti kemudian memilih lokasi dan waktu yang tepat untuk melakukan observasi, serta memutuskan apakah akan menggunakan observasi partisipatif (di mana peneliti terlibat dalam aktivitas yang diamati) atau non-partisipatif (peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat). Data yang diperoleh dari observasi dicatat secara rinci, baik melalui catatan lapangan maupun alat perekam seperti video atau foto. Setelah itu, data dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, atau pemahaman responden tentang suatu fenomena. Langkah-langkah dalam wawancara dimulai dengan merancang pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, peneliti harus memilih responden yang memiliki informasi atau pengalaman yang relevan. Setelah wawancara selesai, data yang dikumpulkan dicatat atau direkam, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tema, atau wawasan baru yang relevan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi dokumen tertulis atau media lain yang sudah ada. Dokumentasi meliputi segala bentuk catatan tertulis, foto, video, atau media lainnya yang digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumen dapat berupa arsip resmi, laporan, artikel, foto, atau bahan-bahan lain yang relevan dengan topik penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh⁴⁶. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan data conclusion drawing/verification.

1. Reduksi Data

Data yang telah di reduksi itu artinya adalah merangkum, memilih hal-hal yang fundamental, terfokus pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memperjelas gambaran yang lebih nyata dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data untuk selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah langkah reduksi data dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah data display atau sajian data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

⁴⁶ Usman dan Akbar Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2022) hal. 119.

penelitian kualitatif sehingga penyajian data dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir ialah pengambilan kesimpulan dan verifikasi, tahap pengambilan kesimpulan ini merupakan tahap paling terakhir dalam analisis data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukannya kuat bukti-bukti yang mendukung.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah dengan teknik kecukupan bahan referensial. Dalam artian memiliki pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya seperti data media akan dicerifikasi dengan hasil temuan wawancara. Dapat juga diselaraskan antara argumentasi yang ada dalam rekamana wawancara sebagai bukti keabsahan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

a. Deskripsi Lokasi Penelitian

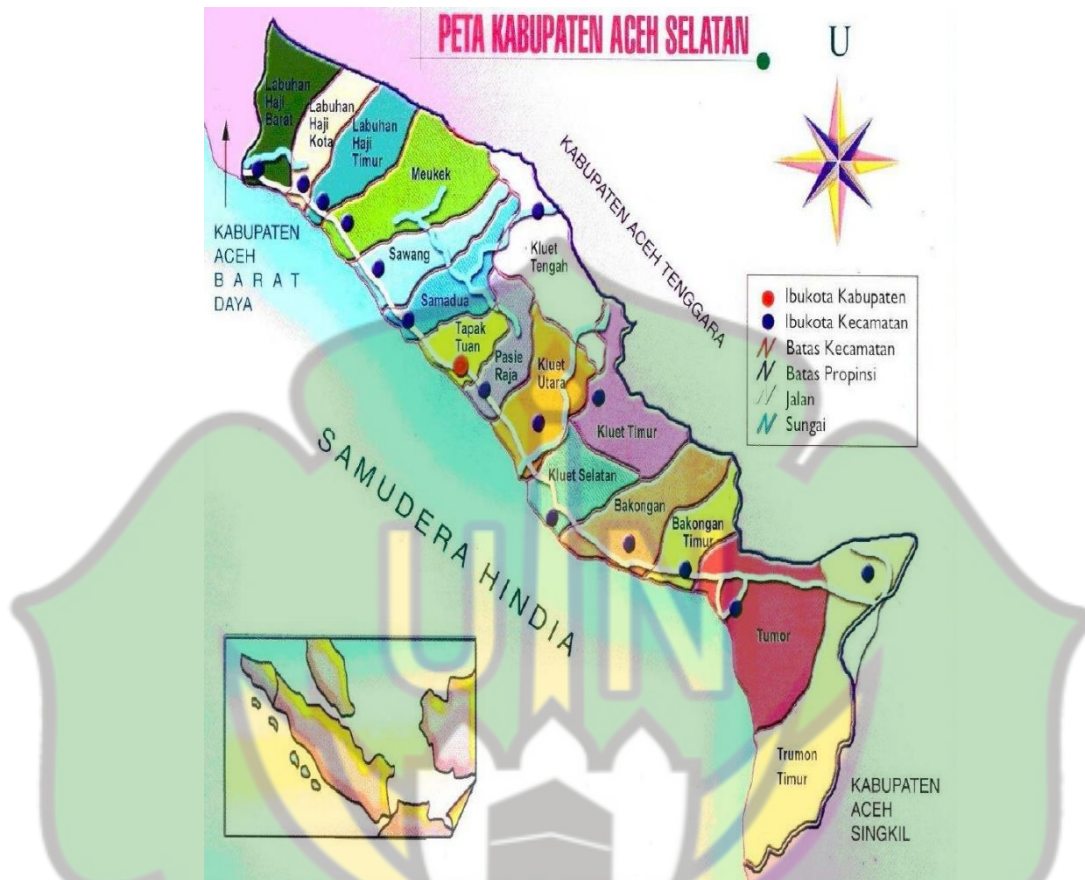
Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah yang ada di provinsi Aceh dengan ibu kotanya Tapaktuan. Kabupaten ini terletak di pesisir pantai Barat Selatan Aceh yang memiliki iklim tropis. Keseluruhan wilayah Kabupaten Aceh Selatan berada ditengah-tengah Samudra Hindia dan Taman Nasional Gunung Lauser. Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, dalam sejarah pembentukannya telah dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 1945 yang berada di wilayah pantai barat-selatan Aceh dan terletak antara 20 -4 0 Lintang Utara (LU) dan 960 -900 Bujur Timur (BT).

Berdasarkan letaknya, kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
3. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Samudra Hindia
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Lauser/Kabupaten Aceh Tenggara.

Aceh Selatan memiliki wilayah daratan sebesar 417.367,7 Ha. Hal ini ditetapkan dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mana luas wilayah tersebut terdiri dari pembagian administrasi pemerintahan yang

meliputi kecamatan, mukim, dan gampong. Adapun peta Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan peta diatas yang ditinjau dari letaknya, maka sangat memudahkan bagi Kabupaten Aceh Selatan melakukan aktivitas dan transaksi ekonomi dengan wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi ini tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat yang cukup memadai di wilayah pantai barat selatan. Selain itu, Kabupaten Aceh Selatan juga menjadi salah satu pintu gerbang utama menuju Kabupaten Simeulue, sehingga memberikan peluang yang cukup besar menjadi pemasok kebutuhan pangan ke Simeulue. Posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Aceh

Selatan juga membuka peluang dan memungkinkan transaksi perdagangan dengan daerah lainnya yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Aceh Selatan saat ini dipimpin oleh Bupati Tgk. Amran untuk masa jabatan 2018-2023, dengan visi dan misi sebagai berikut ini:

Visi :

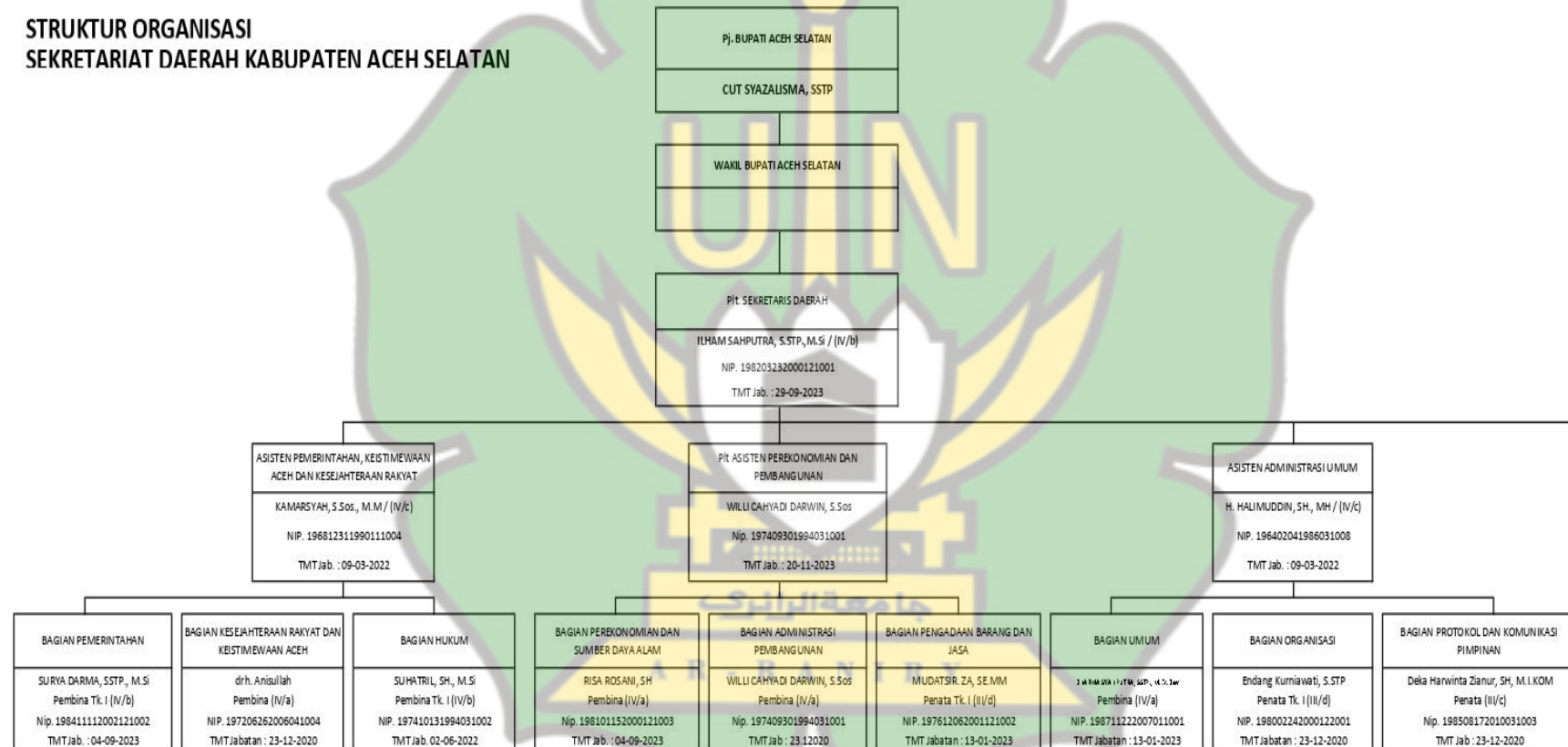
Terwujudnya Aceh Selatan yang Berkeadilan Secara Sosial dan Ekonomi

Misi :

1. Mewujudkan nilai-nilai Syariat Islam dan budaya dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat;
2. Membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional;
3. Memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan sosial secara terintegrasi;
4. Penguatan sistem perencanaan daerah yang lebih efektif dan efisien;
5. Penyederhanaan sistem pelayanan birokrasi pemerintahan;
6. Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan;
7. Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa;
8. Penguatan basis produksi masyarakat dalam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan;
9. Mewujudkan terbangunnya sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
10. Pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

b. Struktur Organisasi Sekda Aceh Selatan

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



c. Kondisi Geografis Aceh Selatan

Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di pesisir barat daya Pulau Sumatera. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 4.173,82 km² dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah di sepanjang garis pantai hingga perbukitan dan pegunungan di bagian pedalaman. Letaknya yang strategis di kawasan pesisir memberikan potensi besar bagi sektor kelautan dan perikanan, sementara kawasan perbukitan dan pegunungan menyimpan kekayaan alam seperti hasil hutan dan tambang. Namun, kondisi geografis yang beragam ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah dan pembangunan infrastruktur.

Di bagian pesisir, Aceh Selatan memiliki garis pantai yang panjang dengan berbagai ekosistem pesisir, seperti pantai berpasir, hutan mangrove, dan terumbu karang. Ekosistem ini tidak hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan tetapi juga mendukung mata pencaharian masyarakat lokal, seperti nelayan dan petani tambak. Namun, wilayah pesisir ini rentan terhadap abrasi, bencana tsunami, dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Di wilayah pedalaman, Aceh Selatan didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Wilayah ini memiliki tanah yang subur dan sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian, terutama untuk komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit. Namun, aksesibilitas ke wilayah pedalaman sering kali menjadi kendala karena terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga menghambat distribusi hasil pertanian ke pasar.

d. Kondisi Demografis Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan, 43 Mukim dan 260 Gampong. Wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil dari garis pangkal seluas 3.677,53 Km², Luas wilayah administrasi Kabupaten Aceh Selatan yang dirinci menurut kecamatan seperti ditunjukkan pada berikut:

Tabel 4. 1
Pembagian Administratif Kabupaten Aceh Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Mukim	Gampong
1	Trumon	Keude Trumon	2	12
2	Trumon Tengah	Ladang Rimba	2	10
3	Trumon Timur	Krueng Luas	2	10
4	Bakongan	Bakongan	2	7
5	Kota Bahagia	Buket Gadeng	2	10
6	Bakongan Timur	Seubadeh	1	7
7	Kluet Selatan	Kandang	3	17
8	Kluet Timur	Paya Dapur	2	9
9	Kluet Utara	Kotafajar	3	21
10	Pasie Raja	Kampung	2	21
11	Kluet Tengah	Manggamat	1	13
12	Tapaktuan	Tapaktuan	2	16
13	Samadua	Kasik Putih	4	28
14	Sawang	Meuligo	4	15
15	Meukek	Kuta Buloh	4	23
16	Labuhahaji	Pasar Lama	3	16
17	Labuhanhaji Timur	Peulumat	2	12
18	Labuhanhaji Barat	Blangkeujeren	4	15

Sumber: <https://acehselatankab.go.id>. Diakses, 25 Mei 2024

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Bidang Pertanian

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah merumuskan berbagai strategi kebijakan untuk mendukung sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kebijakan-kebijakan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian dengan menetapkan tujuan yang diinginkan, membuat perencanaan

yang terarah, menciptakan program yang berkelanjutan, membuat keputusan secara bijak dan mengukur dan mengevaluasi dampak kebijakan.

4.2.1 Mengajukan Tujuan Program Pertanian

Salah satu implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian adalah dengan membuat tujuan program yang jelas dan terukur. Penetapan tujuan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, akademisi dan pakar pertanian untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat mencakup berbagai aspek penting dalam pertanian.

Penetapan tujuan program juga berperan penting dalam mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini adalah Dinas Pertanian. Dengan tujuan yang jelas, alokasi anggaran, tenaga kerja, dan teknologi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dalam wawancara dengan Kabid Pertanian Kabupaten Aceh Selatan mengemukakan bahwa:

“Salah satu kebijakan utama yang kami terapkan adalah menentukan tujuan yang program yang ingin dicapai untuk peningkatan produktivitas pertanian. Tujuan ini mencakup beberapa aspek, seperti peningkatan hasil panen, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan”.⁴⁷

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dinas Pertanian telah menetapkan kebijakan strategis dalam bidang pertanian dengan fokus utama pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, seperti adanya pengajuan alokasi anggaran untuk pupuk subsidi, benih padi gratis dan Kartu Tani. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen, pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga petani.

⁴⁷ Wawancara, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 20 Mei 2024

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dinas BPP Kecamatan Labuhanhaji Barat, Lisma mengatakan bahwa:

“Proses penetapan tujuan dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, kami melakukan analisis mendalam terhadap kondisi pertanian di Aceh Selatan, termasuk tantangan dan potensi yang ada. Kemudian, kami berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, akademisi, dan praktisi pertanian, untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang beragam. Setelah itu, kami menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART goals). Salah satu tujuan yang kami tetapkan adalah meningkatkan produksi padi sebesar 20% dalam tiga tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan ini, kami mengadopsi beberapa strategi, seperti meningkatkan akses petani terhadap benih unggul, menyediakan pelatihan dan penyuluhan berkala tentang teknik budidaya modern, serta memperkuat infrastruktur irigasi”⁴⁸

Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan dinas pertanian di Kabupaten Aceh Selatan telah dirancang dengan tujuan yang jelas, namun masih belum sepenuhnya memenuhi harapan para petani. Banyak petani yang merasa bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan produktivitas melalui pelatihan dan penyuluhan implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan praktis mereka. Misalnya, beberapa petani mengeluhkan bahwa teknik budidaya yang diajarkan belum sepenuhnya relevan dengan kondisi tanah dan iklim lokal yang spesifik sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan.

Kebijakan program pertanian oleh Pemerintah Aceh hingga saat ini belum sepenuhnya optimal dalam menjawab tantangan dan kebutuhan petani di lapangan. Meskipun berbagai program telah dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, masih terdapat kendala seperti koordinasi antarinstansi yang belum terintegrasi, serta kurangnya perhatian terhadap penguatan infrastruktur pertanian. Salah seorang petani mengatakan bahwa:

⁴⁸ Wawancara, Ketua Badan Penyluh Pertanian (BPP) Kecamatan Labuhanahaji Barat. 23 Mai 2024

“Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh petani di Desa Panton Pawoh meliputi kurangnya akses terhadap teknologi pertanian terbaru, keterbatasan infrastruktur irigasi, dan masalah dalam pengadaan benih berkualitas. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan dalam hal perubahan iklim yang berdampak pada hasil panen serta keterbatasan dalam dukungan penyuluhan yang efektif. Banyak petani di Blang mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pertanian, tetapi mereka juga mengungkapkan beberapa kekhawatiran. Misalnya, mereka merasa bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengatasi masalah spesifik yang mereka hadapi, seperti infrastruktur irigasi yang buruk atau kesulitan dalam mendapatkan benih unggul. Selain itu, beberapa petani juga merasa bahwa program penyuluhan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan mereka di lapangan”.⁴⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam sektor pertanian masih menghadapi tantangan meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam mempersiapkan kebijakan yang ada. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, salah satu aspek kunci dari keberhasilan implementasi adalah persiapan yang matang dan adaptasi kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Dalam hal ini, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan pertanian dengan tujuan yang jelas, proses persiapan kebijakan yang terencana masih perlu diperbaiki untuk memastikan efektivitasnya di lapangan.

Dalam praktiknya, penelitian menunjukkan bahwa persiapan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan seringkali kurang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, seperti kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya kecocokan antara kebijakan yang dirancang dengan kondisi implementasi di lapangan. Mereka menggarisbawahi bahwa meskipun kebijakan mungkin dirancang dengan baik, jika tidak ada penyesuaian terhadap

⁴⁹ Wawancara. Jamilah. Petani di Desa Panton Pawoh. 24 Mai 2024

realitas lokal dan dukungan yang memadai, maka kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Menurut Mulyono persiapan kebijakan yang efektif melibatkan evaluasi yang mendalam terhadap kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh target kebijakan⁵⁰. Kebijakan yang diimplementasikan tanpa memperhatikan konteks lokal dan tanpa dukungan yang memadai cenderung menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian ini, di mana kebijakan pertanian yang ada belum sepenuhnya memenuhi harapan petani karena kurangnya adaptasi terhadap kondisi spesifik mereka, seperti kebutuhan infrastruktur irigasi dan penyediaan benih.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada persiapan dan pengorganisasian yang baik dan mesti didukung oleh infrastruktur, tanpa adanya struktur dan mekanisme yang solid untuk mendukung implementasi, kebijakan seringkali gagal mencapai tujuannya⁵¹. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu meningkatkan penyusunan kebijakan dengan memperkuat mekanisme dukungan dan evaluasi di lapangan untuk memastikan bahwa kebijakan pertanian dapat dilaksanakan secara efektif dan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, meskipun ada kebijakan yang telah disiapkan, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa persiapan kebijakan masih memerlukan peningkatan. Penyesuaian terhadap kondisi lokal dan dukungan yang lebih baik di lapangan adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan pertanian

⁵⁰ Mulyono. 2022. Kebijakan Publik. Jakarta; Bumi Akasara.

⁵¹ Kahiaru Muzamir. 2022. Implementasi pelayanan publik. Yogyakarta: Lokajaya Media.

dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi petani di Kabupaten Aceh Selatan.

4.2.2 Membuat Perencanaan yang Terarah

Membuat perencanaan yang terarah merupakan salah satu implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian. Perencanaan ini mencakup identifikasi kebutuhan dan potensi pertanian di setiap desa dengan menyerap aspirasi petani, menganalisis tanah, iklim dan jenis tanaman yang cocok dikembangkan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPP⁵² Kejurun Blang dan Kelompok Tani untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam untuk merencanakan pengembangan pertanian.

Dalam wawancara dengan Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat, mengatakan bahwa:

“Perencanaan yang terarah dalam sektor pertanian adalah salah satu prioritas kami untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian di wilayah ini. Kami berusaha untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat didasarkan pada data yang akurat dan kebutuhan riil di lapangan. Proses perencanaan dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk survei lapangan, konsultasi dengan petani, dan analisis kondisi tanah serta iklim lokal. Kami kemudian mengadakan forum diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti kelompok tani, akademisi, dan penyuluh pertanian, untuk mendapatkan masukan dan saran. Berdasarkan data dan diskusi tersebut, kami menyusun rencana yang terperinci dan spesifik, yang mencakup berbagai aspek seperti penyediaan benih, pengelolaan air, dan dukungan teknis.”⁵²

Implementasi kebijakan dalam perencanaan program pertanian yang terarah bertujuan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, termasuk mengidentifikasi tantangan struktural yang dihadapi oleh petani, seperti

⁵² Wawancara. Zulfikar. Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat. 21 Mai 2024

keterbatasan akses terhadap teknologi, modal dan pasar, serta menggali potensi lokal yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian. Proses ini melibatkan pengumpulan data berbasis bukti, dialog konstruktif dengan para pemangku kepentingan, serta analisis menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di sektor pertanian. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil, kebijakan yang dirancang mampu menghasilkan program-program yang tidak hanya relevan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing sektor pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan wawancara dengan Petani, keikutsertaan petani seringkali masih kurang optimal dalam merencanakan program pemerintah. Petani merasa bahwa aspirasi mereka belum sepenuhnya didengar atau dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam hal koordinasi antara berbagai instansi terkait yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan rencana tersebut. Meskipun ada upaya untuk melakukan pendekatan berbasis data, seringkali perencanaan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan spesifik petani dan kondisi lokal. Seperti yang diungkapkan oleh petani berikut ini:

“Saya merasa bahwa kami, para petani, sering kali tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan dan pekerjaan kami. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa konsultasi dengan kami, sehingga sering kali tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya”⁵³

⁵³ Wawancara, Ari Ansori. Petani di Desa Pantan Rubek. Wawancara, 22 Mai 2024

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan petani dalam proses perencanaan kebijakan. Petani merasa bahwa mereka sering diabaikan dan tidak diajak berkonsultasi, sehingga banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan yang mereka hadapi. Ketidakcocokan ini berdampak langsung pada efektivitas kebijakan. Masalah seperti distribusi pupuk yang tidak tepat waktu dan alat pertanian yang tidak sesuai menjadi contoh konkret dari dampak negatif kebijakan yang tidak melibatkan masukan dari petani.

Menurut teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana perencanaan tersebut dapat diterapkan dengan baik di lapangan dengan menekankan pentingnya kesesuaian antara kebijakan yang dirancang dan kondisi implementasi yang sebenarnya. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah membuat perencanaan yang cukup komprehensif, ada kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Dukungan teknis dan material yang dijanjikan seringkali tidak datang tepat waktu atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik petani, yang menunjukkan bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas di lapangan.

Pentingnya perencanaan yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan dukungan yang memadai untuk implementasi, kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang cukup dan koordinasi yang baik cenderung gagal dalam pelaksanaannya.⁵⁴ Hal ini tercermin dalam hasil penelitian ini, di mana meskipun

⁵⁴ Nazila, Rahmi. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pekerjaan Layak di Indonesia: Pendekatan Panel Data Dinamis*. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024.

perencanaan yang matang dari pemerintah, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam sektor pertanian sudah cukup baik tetapi masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dukungan yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan, serta pengawasan dan evaluasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan masyarakat setempat.

4.2.3 Menciptakan Program Yang Berkelanjutan

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian juga diwujudkan melalui penciptaan program-program yang berkelanjutan seperti pengembangan infrastruktur pertanian irigasi dan jalan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat dan ketahanan pangan. Program-program ini diciptakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi untuk memastikan keberlanjutannya. Wawancara dengan Dinas Pertanian Aceh Selatan:

“Di Dinas Pertanian Aceh Selatan, kami berkomitmen untuk menciptakan program yang berkelanjutan dengan fokus pada tiga aspek utama: pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas petani, dan pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal. Pengelolaan sumber daya alam adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan dalam sektor pertanian. Kami berusaha untuk mengelola air, tanah, dan hutan secara bijaksana. Salah satu program utama kami adalah pengembangan irigasi yang efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, kami juga melakukan reboisasi dan konservasi lahan untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Program ini melibatkan partisipasi aktif dari petani dan komunitas lokal untuk memastikan keberhasilannya”⁵⁵

⁵⁵ Wawancara, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 20 Mei 2024

Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan program yang berkelanjutan dalam meningkatkan hasil pertanian. Salah satu contohnya adalah program pengelolaan air yang efisien. Di wilayah yang sering menghadapi masalah kekurangan air, seperti di desa Pantan Pawoh. Penggunaan teknik irigasi tetes, misalnya, dapat mengurangi pemborosan air dan memastikan bahwa tanaman mendapatkan cukup air. Selain itu, pembuatan embung dan waduk kecil juga dapat membantu menampung air hujan untuk digunakan selama musim kemarau, sehingga kontinuitas pasokan air bagi pertanian tetap terjaga.

Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan juga merupakan langkah penting dalam menciptakan program yang berkelanjutan. Pelatihan tentang praktik pertanian yang ramah lingkungan, penggunaan pupuk dan pestisida yang bijaksana, serta teknik budidaya tanaman yang lebih efisien dapat membantu petani meningkatkan produktivitas mereka tanpa merusak lingkungan. Program pelatihan ini bisa dilakukan secara berkala dengan melibatkan ahli pertanian dan akademisi. Selain itu, mendukung pembentukan kelompok tani dan koperasi dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar petani, serta memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya dan pasar.

Penerapan teknologi pertanian modern juga merupakan bagian dari program berkelanjutan yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Penggunaan varietas benih unggul yang tahan terhadap penyakit dan perubahan iklim dapat

membantu petani mengatasi tantangan yang dihadapi dalam bercocok tanam. Selain itu, alat-alat pertanian modern seperti traktor mini, alat tanam otomatis, dan sensor tanah dapat meningkatkan efisiensi kerja dan hasil panen. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk mengembangkan teknologi baru yang sesuai dengan kondisi lokal juga sangat penting. Teknologi ini harus mudah diadopsi oleh petani dan memberikan manfaat nyata dalam jangka panjang.

Diversifikasi tanaman juga dapat menjadi strategi berkelanjutan untuk meningkatkan hasil pertanian. Dengan menanam berbagai jenis tanaman yang berbeda, petani dapat mengurangi risiko gagal panen akibat penyakit atau kondisi cuaca ekstrem. Diversifikasi juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Program ini dapat didukung dengan penyediaan benih dan bibit yang berkualitas, serta pelatihan tentang teknik budidaya berbagai jenis tanaman.

Wawancara dengan Keujrun Blang mengatakan bahwa:

“Secara umum, program pertanian yang dijalankan oleh pemerintah daerah sudah menunjukkan kebijakan yang baik. Namun, banyak petani merasa bahwa program tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Seringkali ada tumpang tindih tugas dan kurangnya komunikasi yang baik antara dinas pertanian, penyuluh, dan kelompok tani. Hal ini menyebabkan program yang sudah direncanakan dengan baik tidak bisa dijalankan dengan efektif. Kami berharap ada peningkatan dalam hal koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat agar program dapat berjalan lebih lancar dan efisien”.⁵⁶

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya mengimplementasikan kebijakan sektor pertanian dengan menciptakan program-program yang berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian sekaligus memastikan

⁵⁶ Wawancara. M Kasah. Keujrun Blang. 22 Mai 2024

keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani. Salah satu program utama adalah pengelolaan sumber daya alam yang efisien, termasuk pengembangan sistem irigasi yang hemat air dan penggunaan teknik budidaya yang ramah lingkungan. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas petani untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

Pentingnya perencanaan kebijakan yang didasarkan pada analisis kebutuhan mendalam dan dukungan memadai untuk implementasi. Tanpa sumber daya yang cukup dan koordinasi yang baik, kebijakan cenderung gagal dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mendukung pandangan tersebut, menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dan perencanaan matang dari pemerintah, pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan perbaikan signifikan.⁵⁷ Dukungan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan, serta koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait, sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.

Hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk menciptakan program yang berkelanjutan dalam sektor pertanian adalah langkah positif, namun masih membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan di lapangan. Pendekatan yang lebih holistik, melibatkan analisis kebutuhan mendalam, koordinasi antar instansi, dukungan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan, serta mekanisme pengawasan yang efektif adalah kunci untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Dengan demikian, kebijakan yang berkelanjutan dapat benar-benar meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani di Aceh Selatan.

⁵⁷ Wijayanti, Sri H., et al. *Masalah-masalah Strategis dan Keamanan Manusiawi di Pasifik Selatan*. Airlangga University Press, 2022.

4.2.4 Mengukur Dan Megevaluasi Dampak Kebijakan

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan termasuk pengukuran dan evaluasi dampak kebijakan. Pengukuran dampak kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pengumpulan data yang akurat mengenai produksi pertanian, kesejahteraan petani, dan perubahan dalam penggunaan lahan. Pemerintah juga melakukan survei dan wawancara dengan para petani serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang efek kebijakan tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menilai keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Evaluasi dampak kebijakan melibatkan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap masyarakat. Proses evaluasi ini mencakup penilaian terhadap keberlanjutan kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut telah mengubah praktik pertanian, dan dampak ekonominya terhadap petani. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Melalui evaluasi yang menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai penyesuaian atau perbaikan kebijakan guna meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani di masa depan.

Dalam wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan mengemukakan bahwa:

“Kami di Dinas Pertanian Aceh Selatan memiliki beberapa mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi dampak kebijakan. Langkah pertama adalah dengan melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program-program pertanian yang telah dijalankan. Kami mengumpulkan data secara berkala dari lapangan, termasuk hasil panen, tingkat adopsi teknologi oleh petani, dan masalah yang dihadapi selama implementasi.”⁵⁸

Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Aceh Selatan menunjukkan pendekatan sistematis yang diterapkan dalam mengukur dan mengevaluasi dampak kebijakan di sektor pertanian. Salah satu pendekatan adalah pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program-program pertanian yang telah dijalankan. Hal ini mencakup pengumpulan data secara berkala dari lapangan yang mencatat berbagai indikator seperti hasil panen, tingkat adopsi teknologi oleh petani dan masalah yang muncul selama implementasi.

Evaluasi ini menunjukkan komitmen Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan dampak yang nyata bagi petani dan sektor pertanian secara keseluruhan. Dengan melakukan pemantauan rutin dan pengumpulan data lapangan secara berkala dapat mengidentifikasi tren, masalah yang perlu segera diatasi dan peluang untuk peningkatan lebih lanjut.

Selain itu, evaluasi program sebagai upaya untuk mengadopsi pendekatan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan. Dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan dari lapangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat membuat evaluasi yang lebih obyektif dan mendalam tentang efektivitas kebijakan yang diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya

⁵⁸ Wawancara, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 20 Mei 2024

yang tersedia digunakan dengan efisien dan bahwa kebijakan yang direkomendasikan dapat berdampak positif dalam jangka panjang.

Selanjutnya wawancara dengan ketua BPP Kecamatan Labuhanhaji Barat mengungkapkan bahwa:

“Kami menggunakan berbagai indikator untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan. Indikator utama mencakup peningkatan hasil panen, efisiensi penggunaan air dan pupuk, serta peningkatan pendapatan petani. Selain itu, kami juga mengukur tingkat partisipasi petani dalam program pelatihan dan adopsi teknologi baru, serta keberlanjutan lingkungan seperti kesehatan tanah dan konservasi air. Semua data ini dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dampak kebijakan yang telah dijalankan”⁵⁹

Wawancara dengan Ketua BPP Kecamatan Labuhanhaji Barat memberikan gambaran yang terstruktur dan sistematis mengenai evaluasi dari dampak kebijakan di sektor pertanian. Dengan mengukur tingkat partisipasi petani dalam program pelatihan dan adopsi teknologi baru, Dinas Pertanian juga menunjukkan komitmen dalam memperkuat kapasitas petani. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, evaluasi terhadap keberlanjutan lingkungan seperti kesehatan tanah dan konservasi air menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem pertanian untuk jangka panjang.

Pernyataan bahwa semua data dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dampak kebijakan terhadap program yang telah diterapkan. Dengan demikian, Dinas Pertanian Aceh Selatan tidak hanya mengandalkan pengalaman juga mengadopsi pendekatan ilmiah yang sistematis untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan. Wawancara dengan Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat mengatakan bahwa

⁵⁹ Wawancara, Lisma, Ketua BPP Kecamatan Labuhanhaji Barat, 22 Mai 2024

“Kami bekerja sama dengan para penyuluh pertanian di lapangan yang secara langsung berinteraksi dengan petani. Penyuluh ini dilatih untuk mengumpulkan data dengan metode yang akurat dan standar yang konsisten. Selain itu, kami juga menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) dan aplikasi mobile untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data. Kami memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup berbagai wilayah dan jenis pertanian untuk mendapatkan gambaran yang representative”⁶⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa Camat memiliki pendekatan yang terstruktur dan berbasis teknologi dalam mengumpulkan dan mengelola data terkait implementasi kebijakan pertanian. Penyuluh pertanian yang dilibatkan dalam proses pengumpulan data merupakan aset penting, karena mereka memiliki akses langsung ke petani dan dapat mengumpulkan informasi yang akurat secara langsung dari lapangan. Dengan melatih penyuluh dalam metode pengumpulan data yang akurat dan standar yang konsisten, Dinas Pertanian memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pertanian di Kabupaten Aceh Selatan, terlihat bahwa pemerintah daerah telah mengadopsi pendekatan yang memperhatikan pengukuran dan evaluasi dampak program secara sistematis. Langkah ini konsisten dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi sebagai bagian integral dari siklus kebijakan. Dalam hali ini Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan aktif dalam mengumpulkan data tentang pelaksanaan program pertanian, seperti hasil panen dan partisipasi petani dalam pelatihan.

⁶⁰ Wawancara. Zulfikar. Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat. 21 Mai 2024

Menurut teori implementasi kebijakan, pendekatan yang berbasis pada pengukuran dan evaluasi dampak program membantu pemerintah untuk memahami efektivitas kebijakan yang diterapkan. Evaluasi yang baik dapat memberikan umpan balik yang berharga bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan mengumpulkan data secara teratur dan menganalisisnya dengan teliti, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pertanian mereka.⁶¹

Handoyono mengemukakan bahwa pentingnya evaluasi yang terintegrasi dalam siklus kebijakan. Evaluasi yang efektif tidak hanya memantau hasil program, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam hal pertanian di Aceh Selatan, evaluasi yang komprehensif dapat membantu mengungkapkan kendala-kendala praktis yang mungkin dihadapi oleh petani dan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan dapat disesuaikan untuk meningkatkan dampak positifnya.⁶²

Secara praktis, pemerintah Aceh Selatan perlu terus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengumpulkan data yang akurat dan relevan serta memastikan evaluasi dilakukan secara teratur. Hal ini akan memungkinkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk lebih responsif terhadap perubahan kondisi lapangan dan memperbaiki kebijakan yang ada sesuai dengan kebutuhan nyata petani. Dengan demikian, pengukuran dan evaluasi dampak program tidak hanya menjadi alat untuk pertanggungjawaban publik, tetapi juga instrumen

⁶¹ Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.

⁶² Handoyo, E. 2012.. Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*, 323.

penting dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Aceh Selatan.

C. Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Bidang Pertanian

Implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian menemukan berbagai kendala yang menunjukkan kompleksitas dan dinamika yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dari keterbatasan sumber daya finansial hingga infrastruktur yang tidak memadai, setiap tantangan menuntut solusi yang komprehensif dan terkoordinasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditemukan beberapa poin terkait dengan tantangan implementasi sebagai berikut ini:

4.3.1 Keterbatasan Anggaran

Hambatan dalam implementasi kebijakan publik terhadap sektor pertanian di Aceh Selatan yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dalam bidang pertanian di Kabupaten Aceh Selatan tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang memengaruhi pengelolaan dan distribusi sumber daya daerah. Dinamika politik yang terjadi, termasuk hubungan antara eksekutif dan legislatif, sering kali memengaruhi prioritas alokasi anggaran, di mana sektor pertanian yang seharusnya menjadi andalan perekonomian masyarakat justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Persaingan politik dan kepentingan kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan anggaran sering kali mengesampingkan kebutuhan strategis seperti pengembangan pertanian.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh

Selatan berikut ini:

“Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hambatan utama yang kami hadapi. Dengan anggaran yang terbatas, kami kesulitan untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi petani, seperti distribusi benih berkualitas, pupuk, dan alat pertanian. Selain itu, program pelatihan dan penyuluhan juga terkena dampaknya, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani”.⁶³

Keterbatasan anggaran dalam bidang pertanian di Kabupaten Aceh Selatan menjadi salah satu isu utama yang dihadapi selama masa kepemimpinan Bupati Tgk. Amran. Defisit anggaran sebesar 1.43 Miliar telah menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program pengembangan pertanian yang penting bagi perekonomian masyarakat. Salah satu penyebab utama defisit ini adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar disebabkan oleh lemahnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Penurunan PAD tidak hanya membatasi ruang fiskal pemerintah tetapi juga memaksa daerah untuk memprioritaskan pengeluaran pada sektor lain yang dianggap lebih mendesak, sementara sektor pertanian sering kali terabaikan.

Kondisi ini berdampak langsung pada petani yang sangat bergantung pada dukungan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas mereka. Minimnya alokasi anggaran untuk subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pelatihan bagi petani telah menurunkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian di daerah tersebut. Selain itu, program-program strategis seperti pembangunan irigasi dan infrastruktur jalan tani juga terhambat, sehingga distribusi hasil panen menjadi tidak maksimal. Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memberikan

⁶³ Wawancara, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 20 Mai 2024

dukungan yang memadai menciptakan keresahan di kalangan petani, yang merasa bahwa kebutuhan mereka tidak menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.

Selanjutnya wawancara dengan Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat juga mengemukakan hal yang sama:

“Keterbatasan anggaran memang menjadi masalah besar. Banyak program yang seharusnya bisa membantu petani tidak dapat dijalankan dengan optimal. Misalnya, pembangunan infrastruktur irigasi yang sangat dibutuhkan oleh petani sering tertunda karena dana yang tidak mencukupi. Kami di tingkat kecamatan sering kali harus mencari solusi alternatif, tetapi itu pun tidak selalu cukup untuk mengatasi masalah yang ada”⁶⁴

Hasil wawancara camat dapat diketahui bahwa keterbatasan anggaran adalah hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan pertanian. Dana yang terbatas menghalangi pelaksanaan program yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Tanpa anggaran yang memadai, banyak program penting, seperti distribusi benih berkualitas, penyediaan pupuk, dan pelatihan teknis, tidak dapat dijalankan dengan efektif.

Di tingkat kecamatan, keterbatasan anggaran juga menghambat pembangunan infrastruktur vital seperti irigasi yang sangat diperlukan untuk mendukung pertanian. Penundaan dalam pembangunan ini memaksa pihak kecamatan untuk mencari solusi alternatif tetapi solusi ini sering kali tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Kurangnya infrastruktur irigasi yang memadai menyebabkan kesulitan bagi petani dalam mengelola lahan mereka, yang pada akhirnya berdampak negatif pada hasil panen dan pendapatan mereka.

⁶⁴ Wawancara. Zulfikar. Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat. 21 Mai 2024

Selanjutnya wawancara dengan ketua BPP Kecamatan Labuhanhaji Barat mengatakan bahwa:

“Keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi efektivitas kami dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani. Dengan dana yang terbatas, kami tidak bisa sering turun ke lapangan untuk memberikan pelatihan atau mendistribusikan materi informasi yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan petani kurang mendapatkan pengetahuan tentang teknik pertanian terbaru dan praktik yang lebih efisien”.⁶⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi efektivitas program penyuluhan dan bimbingan yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluh Pertanian (BPP). Dengan dana yang terbatas, frekuensi kunjungan penyuluh ke lapangan berkurang, yang mengakibatkan minimnya pelatihan langsung kepada petani. Distribusi materi informasi yang penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani juga terhambat, menyebabkan petani kurang mendapatkan akses terhadap teknik pertanian terbaru dan praktik yang lebih efisien.

Dampak dari keterbatasan ini tidak hanya dirasakan oleh BPP tetapi juga oleh petani yang sangat bergantung pada informasi dan pelatihan tersebut untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Kurangnya penyuluhan berarti petani tidak mendapatkan pembaruan terkini mengenai teknologi pertanian, metode pengelolaan tanaman, serta cara-cara baru untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan serangan hama. Tanpa pengetahuan ini, petani cenderung mempertahankan praktik lama yang mungkin kurang efisien dan produktif.

“Kami sering kali harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan seperti pupuk atau benih. Selain itu, program pelatihan juga jarang

⁶⁵ Wawancara, Lisma, Ketua BPP Kecamatan Labuhanhaji Barat, 22 Mai 2024

diadakan. Kami merasa kurang didukung untuk mengembangkan pertanian kami, padahal bantuan itu sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil panen.”⁶⁶

Hasil wawancara dengan petani dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masalah mendasar dalam implementasi kebijakan pertanian di Aceh Selatan, terutama terkait dengan distribusi bantuan dan program pelatihan. Petani sering kali harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan penting seperti pupuk atau benih, yang seharusnya diterima tepat waktu untuk mendukung siklus tanam padi. Keterlambatan ini berdampak negatif pada produktivitas pertanian, menghambat upaya petani untuk memaksimalkan hasil panen. Selain itu, kelangkaan program pelatihan menambah masalah ini, karena petani tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kurangnya dukungan ini menunjukkan masalah sistemik dalam manajemen distribusi bantuan dan pengembangan kapasitas petani. Ketidakefisienan dalam distribusi dan pelaksanaan program menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem logistik dan peningkatan frekuensi serta kualitas pelatihan bagi petani. Bantuan yang tepat waktu dan relevan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, memastikan bahwa kebutuhan petani diidentifikasi secara akurat, dan mengimplementasikan solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan yang ada. Dukungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan petani akan memainkan peran kunci dalam mencapai keberhasilan program pertanian di Aceh Selatan.

⁶⁶ Wawancara. Zulfikar. Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat. 21 Mai 2024

4.3.2 Infrastruktur yang Tidak Memadai

Keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai di Aceh Selatan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan sektor pertanian yang juga dipengaruhi oleh performa politik. Infrastruktur seperti jalan menuju lahan pertanian, jaringan irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen sering kali terabaikan akibat konflik kepentingan politik dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Selama masa kepemimpinan Tgk Amaran, alokasi anggaran untuk sektor pertanian kerap kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai karena adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan politik lainnya, seperti pembangunan fasilitas publik yang lebih terlihat atau proyek yang dianggap lebih menguntungkan secara politik.

Pemerintah daerah telah mengusulkan beberapa proyek perbaikan infrastruktur ke tingkat provinsi dan pusat serta bekerja, namun tanpa perbaikan infrastruktur yang memadai, kebijakan dan program pertanian yang baik di atas kertas sulit untuk direalisasikan secara efektif di lapangan, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Aceh Selatan.

“Salah satu hambatan utama adalah infrastruktur yang tidak memadai. Kami menghadapi banyak masalah dengan jaringan irigasi yang buruk, jalan pertanian yang rusak, dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi. Semua ini berdampak negatif pada produktivitas dan efisiensi pertanian. Kami telah mengusulkan beberapa proyek perbaikan infrastruktur ke pemerintah provinsi dan pusat, termasuk perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas irigasi. Kami juga bekerja sama dengan lembaga donor untuk mendapatkan dukungan finansial. Selain itu, kami terus berdiskusi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang efektif”⁶⁷

“Infrastruktur yang buruk sangat mempengaruhi petani kami. Akses ke pasar menjadi sulit karena jalan yang rusak, sehingga hasil panen sering

⁶⁷ Wawancara, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 20 Mai 2024

kali tidak sampai ke pasar dalam kondisi baik atau tepat waktu. Ini menyebabkan kerugian finansial bagi petani. Selain itu, irigasi yang tidak memadai membuat petani kesulitan dalam mengelola air untuk tanaman mereka, terutama selama musim kemarau”⁶⁸

Wawancara dengan Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat menunjukkan bahwa infrastruktur yang buruk merupakan hambatan signifikan bagi sektor pertanian di Aceh Selatan. Kondisi jalan yang rusak membuat akses ke pasar menjadi sulit, menyebabkan hasil panen sering kali tiba dalam kondisi tidak baik atau terlambat. Hal ini berdampak langsung pada kerugian finansial bagi petani, yang akhirnya mengurangi pendapatan mereka dan menghambat kesejahteraan ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai ini menunjukkan betapa pentingnya perbaikan jalan dan fasilitas transportasi untuk memastikan hasil panen dapat dipasarkan dengan efektif dan efisien.

Dinamika politik yang tidak stabil, seperti seringnya pergantian pejabat atau ketidakselarasan antara pemerintah daerah dan legislatif, juga turut memperburuk situasi. Ketidakefektifan dalam pengambilan keputusan menyebabkan banyak proyek infrastruktur pertanian terbengkalai atau tidak terlaksana sesuai rencana. Selain itu, distribusi proyek infrastruktur terkadang dipengaruhi oleh afiliasi politik tertentu, sehingga menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Hal ini menciptakan disparitas di antara wilayah-wilayah di Aceh Selatan, dengan daerah terpencil sering kali menjadi korban dari minimnya akses terhadap infrastruktur pertanian yang memadai.

Selain itu, masalah irigasi yang tidak memadai menjadi tantangan besar lainnya, terutama selama musim kemarau. Kesulitan dalam mengelola air untuk

⁶⁸ Wawancara. Zulfikar. Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat. 21 Mai 2024

tanaman mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian dan dapat menyebabkan kerugian panen yang signifikan. Kekurangan infrastruktur irigasi ini menyoroti perlunya investasi dalam pembangunan dan perbaikan sistem irigasi yang dapat mendukung kebutuhan air petani sepanjang tahun. Dengan infrastruktur yang memadai, petani akan lebih mampu mengoptimalkan hasil panen mereka, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

“Kami berusaha memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik irigasi alternatif dan penggunaan teknologi sederhana untuk mengatasi masalah air. Namun, solusi jangka panjang tetap memerlukan perbaikan infrastruktur yang signifikan. Kami juga mendorong petani untuk membentuk kelompok tani agar dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah infrastruktur, tetapi dukungan pemerintah tetap sangat dibutuhkan”⁶⁹

Hasil wawancara dengan Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Aceh Selatan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan untuk meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan teknik irigasi alternatif dan penggunaan teknologi sederhana, hambatan utama tetap terletak pada infrastruktur yang tidak memadai. BPP berusaha memberdayakan petani dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka mengatasi beberapa tantangan terkait air, tetapi tanpa perbaikan infrastruktur yang lebih luas dan berkelanjutan, upaya ini hanya dapat memberikan solusi sementara. Pendekatan yang diambil oleh BPP ini penting karena menciptakan dasar yang kuat untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, namun efektivitasnya dibatasi oleh kondisi infrastruktur yang ada.

⁶⁹ Wawancara, Lisma, Ketua BPP Kecamatan Labuhanhaji Barat, 22 Mai 2024

BPP juga mendorong pembentukan kelompok tani sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerjasama antar petani dalam mengatasi masalah infrastruktur. Namun, inisiatif ini membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dalam bentuk investasi dan perbaikan infrastruktur. Kesadaran BPP akan perlunya dukungan pemerintah menandakan bahwa perbaikan infrastruktur yang signifikan adalah kunci untuk solusi jangka panjang. Tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah dalam memperbaiki jaringan irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan, upaya BPP dalam pelatihan dan pembentukan kelompok tani tidak akan mampu sepenuhnya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh petani di Aceh Selatan.

Dari segi kebijakan publik, pentingnya responsifnya pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur dasar di pedesaan, terutama dalam mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Solusi jangka panjang yang diperlukan meliputi perbaikan sistem transportasi dan jaringan irigasi yang lebih baik, serta pendekatan yang terkoordinasi antarinstansi untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat petani. Dengan memperbaiki infrastruktur ini, pemerintah dapat tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup petani secara keseluruhan, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Aceh Selatan.

4.3.3 Demografi Lahan Pertanian

Masalah dalam implementasi kebijakan di bidang pertanian yang terkait dengan demografi lahan pertanian di Aceh Selatan sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan dinamika politik lokal. Demografi lahan pertanian yang beragam,

mulai dari kesuburan tanah, luas kepemilikan lahan, hingga lokasi yang terpencil, menimbulkan tantangan tersendiri dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang merata dan efektif. Wilayah dengan aksesibilitas yang rendah sering kali menghadapi kesulitan dalam menerima bantuan teknis, distribusi subsidi, maupun pembangunan infrastruktur pendukung. Hal ini diperburuk oleh pengaruh politik, di mana distribusi program sering kali lebih terkonsentrasi pada daerah yang menjadi basis dukungan politik bupati terpilih.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam implementasi kebijakan, di mana wilayah yang tidak menjadi basis politik atau pendukung pemerintah cenderung kurang mendapatkan perhatian. Proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan irigasi, peningkatan jalan tani, dan distribusi alat dan mesin pertanian lebih banyak diarahkan ke daerah-daerah yang memiliki signifikansi politik bagi penguasa. Akibatnya, wilayah lain yang memiliki potensi pertanian tinggi namun secara politis tidak strategis, sering kali tertinggal dalam pembangunan. Ketimpangan ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas pertanian secara keseluruhan tetapi juga menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan petani, yang merasa bahwa kebutuhan mereka tidak diprioritaskan.

“Demografi lahan pertanian merupakan masalah serius di wilayah kami. Pertumbuhan populasi yang cepat dan kebutuhan akan pemukiman serta infrastruktur publik lainnya telah mengurangi lahan pertanian yang tersedia. Hal ini mempengaruhi produktivitas pertanian dan keberlanjutan sektor ini di masa depan.”⁷⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan mengidentifikasi demografi lahan pertanian sebagai tantangan serius yang dihadapi dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Dampak langsung

⁷⁰ Wawancara, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 20 Mai 2024

dari pertumbuhan populasi yang cepat dan perkembangan infrastruktur publik yang mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan penggunaan lainnya. Penurunan luas lahan pertanian ini secara signifikan mempengaruhi produktivitas pertanian dan potensi pertumbuhan ekonomi petani di masa depan.

Demografi lahan pertanian yang mengkhawatirkan ini mendorong perlunya kebijakan yang lebih ketat dan perlindungan yang kuat terhadap lahan pertanian. Upaya pemetaan dan analisis yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang rentan terhadap konversi adalah langkah awal yang positif. Namun, tantangan sebenarnya terletak pada implementasi kebijakan yang efektif untuk melindungi sisa-sisa lahan pertanian yang masih tersedia dan memastikan bahwa pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan keberlanjutan sektor pertanian.

Upaya koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, Badan Penyuluh Pertanian (BPP), dan masyarakat menjadi krusial dalam menghadapi tantangan ini. Tanggapan dari berbagai pihak menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga lahan pertanian untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial di Aceh Selatan. Meskipun kompleksitasnya, upaya kolaboratif ini memberikan harapan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan dukungan masyarakat yang kuat, masalah demografi lahan pertanian dapat diatasi secara bertahap untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh BPP Kecamatan Labuahnhaji Barat berikut ini:

“Kami telah melakukan pemetaan dan analisis untuk mengidentifikasi lahan pertanian yang rentan terhadap konversi. Selain itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan perlindungan

lahan pertanian serta mendorong penggunaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan”⁷¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Aceh Selatan telah mengambil langkah proaktif dalam menghadapi tantangan konversi lahan pertanian. Melalui pemetaan dan analisis yang teliti telah berhasil mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap konversi lahan. Pendekatan ini untuk memprioritaskan perlindungan lahan pertanian yang masih produktif, sehingga dapat menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan pangan lokal di wilayah tersebut. Selain itu, kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan perlindungan lahan pertanian menunjukkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan.

Langkah-langkah yang diambil juga mencakup dorongan terhadap penggunaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial ekonomi. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan, seperti penerapan praktik konservasi tanah dan air serta promosi teknologi pertanian yang ramah lingkungan, Dinas Pertanian berusaha untuk meningkatkan produktivitas sambil menjaga keberlanjutan lingkungan.

Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat mengemukakan bahwa:

“Kami di tingkat kecamatan berupaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. Kami memperkuat regulasi terkait penggunaan lahan dan mengkoordinasikan dengan dinas terkait untuk memastikan bahwa setiap perubahan penggunaan lahan dipertimbangkan secara hati-hati demi keberlanjutan sektor pertanian”

⁷¹ Wawancara, Lisma, Ketua BPP Kecamatan Labuhanhaji Barat, 22 Mai 2024

Hasil wawancara dengan Camat menunjukkan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam mengelola penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Selatan. Camat menegaskan komitmen untuk melindungi lahan pertanian sambil tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pemukiman. Langkah-langkah konkret seperti memperkuat regulasi penggunaan lahan merupakan upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan dinas terkait, Camat berusaha memastikan bahwa setiap perubahan dalam penggunaan lahan dipertimbangkan dengan cermat, menghindari konversi lahan pertanian yang dapat mengancam produktivitas dan keberlanjutan jangka panjang.

Pendekatan Camat memberikan gambaran tentang upaya konkret dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Aceh Selatan. Dengan mempertimbangkan secara hati-hati setiap perubahan dalam penggunaan lahan, mereka tidak hanya melindungi aset ekonomi vital seperti pertanian, tetapi juga menjamin bahwa pertumbuhan daerah dapat berlangsung sejalan dengan kesejahteraan masyarakat pertanian dan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Ketua BPP Kecamatan Labuhanhaji Barat mengatakan bahwa:

“Sebagai Badan Penyuluh Pertanian, kami terlibat langsung dengan petani untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Kami memberikan pelatihan tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan membantu petani dalam mengakses program bantuan untuk memperbaiki kualitas lahan mereka”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penyuluh Pertanian (BPP) sangat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian di Aceh Selatan. BPP terlibat langsung dengan petani untuk meningkatkan kesadaran akan

pentingnya perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap lahan pertanian. Dengan memberikan pelatihan tentang praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, BPP membantu meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan mereka secara efisien dan berkelanjutan. Selain itu, peran mereka dalam memfasilitasi akses petani terhadap program bantuan untuk memperbaiki kualitas lahan menjadi kunci dalam mendukung produktivitas dan keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut.

Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk mencapai seluruh petani di wilayah yang luas seperti Aceh Selatan. Dalam hal ini, perlu adanya dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat peran BPP serta memastikan bahwa program-program edukasi dan bantuan teknis dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, BPP dapat terus menjadi mitra yang efektif dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Selatan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian berdasarkan prioritas dan arah strategi pembangunan. Langkah-langkah strategis yang diambil bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, meskipun realisasinya terkadang tergantung pada kepentingan politik yang dominan. Pemerintah berupaya menetapkan tujuan program yang jelas dan spesifik untuk memastikan semua inisiatif memiliki arah yang terukur, namun alokasi sumber daya sering kali diprioritaskan pada wilayah yang menjadi basis politik bupati atau pendukungnya. Dalam perencanaan yang terarah, meskipun langkah-langkah konkret telah diidentifikasi, realisasi di lapangan sering terkendala oleh distribusi anggaran yang tidak merata yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam menentukan prioritas wilayah penerima manfaat.

Selain itu, pemerintah menciptakan program berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, keberlanjutan program ini kerap terhambat oleh ketergantungan pada keputusan politik yang berubah-ubah, terutama di tengah ketidakstabilan alokasi anggaran dan perencanaan jangka panjang. Evaluasi dan pengukuran dampak kebijakan dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas program, tetapi sering kali evaluasi tersebut tidak sepenuhnya objektif, karena tekanan politik dapat memengaruhi hasil dan prioritas kebijakan.

Tantangan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang pertanian sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang memengaruhi alokasi sumber daya dan prioritas pembangunan. Keterbatasan anggaran yang sebagian besar disebabkan oleh defisit keuangan dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), membatasi kemampuan pemerintah untuk mendukung sektor pertanian melalui program pelatihan, subsidi, dan pengadaan alat pertanian yang dibutuhkan petani. Situasi ini semakin kompleks karena pengaruh politik sering kali menentukan distribusi program dengan daerah yang menjadi basis dukungan politik lebih diutamakan, sementara wilayah terpencil atau non-basis cenderung terabaikan. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses jalan menuju lahan pertanian, sistem irigasi yang belum optimal, dan minimnya fasilitas penyimpanan, memperparah kesulitan petani dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar. Demografi lahan pertanian yang beragam, dengan variasi kesuburan tanah dan lokasi terpencil, semakin memperumit implementasi kebijakan yang merata, sehingga diperlukan komitmen politik yang lebih inklusif untuk mengatasi ketimpangan ini.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian agar dapat mendukung program-program yang lebih inovatif dan berkelanjutan
2. Perlu adanya perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi, akses jalan menuju lahan pertanian, dan fasilitas penyimpanan hasil panen.

3. Pemerintah harus mendorong adopsi teknologi modern di sektor pertanian, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), teknologi berbasis digital, dan sistem irigasi pintar.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan penyuluhan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas petani.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, S.Z (2021). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwa.
- Agustino, L (2020) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, F dan Alam, S (2022). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Ali, M. (2019) *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Grasindo.
- Bintoro, T, (2023) *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Burgin, B (2023). *Analisa Data penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Conyers, D (2021). *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Darmawan, E (2023). *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*. Semarang: BP UNDIP.
- Dwiyanto, A (2020). *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Jogjakarta: Gajahmada University Press.
- Efendi, U (2021). *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: Liberty.
- Herliata. (2020) *Pembangunan Nasional*, Jakarta: Alpirin.
- Kansil. (2021). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Keban, Y (2022) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Moleong.L (2020) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufiz, D (2020). *Prinsip Perumusan Dalam Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, D (2015) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Mustopadidjaya. (2022) *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN. 2022.
- Nadia, S (2022). *Pengertian, Jenis-jenis, dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik*. Bandung: Rajawali Press.
- Nawawi, I (2019) *Public Policy, Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nazi, M. (2023) *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nugroho, RD (2020). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, H (2019) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Putra, F (2021) *Partai Politik dan Kebijakan Publik terhadap implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Silichin. A.B (2018) *Pengantar Analisis Publik*. Universitas Muhammadiyah: Malang.
- Slamet, M. (2022). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Soenarko (2020), *Public policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Erlangga University Press.
- Subarsono. (2022) *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Akfabeta.
- Sujamto, (2018). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, cetakan II*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sumarto, S (2019). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Sunggono, B (2019), *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika..
- Syafiie, I.K (2020). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Tamin, F (2020), *Reformasi Birokrasi : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Jakarta : Belantika.
- Toha, M (2023). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman dan Setiady, A (2022). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S (2021). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, B (2022) *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal

- Evita Eka, Bambang Supriyono, Imam Hanafi. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 1, No. 5
- Fauziah, N. (2021). Analisis Perencanaan dan Pengawasan Biaya Operasional Pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Makassar, *Skripsi*, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
- Murdiningsih. (2023) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Dinas Kota Manado. *Jurnal Administrasi Politik, (online)*, Vol 2, No 3, (<http://ejournal.unsrat.untan.ac.id>), diakses 5 Juli 2023.

Website

Risky Hardian Saputra. Petani Aceh Selatan tujuh kali gagal tanam akibat irigasi tak fungsi, begini penjelasannya. Dikutip dari: <https://aceh.antaranews.com>. 14 Mei 2023

<https://acehselatankab.go.id/halaman/geografis-dan-demografi>



DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto Bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan



Foto dengan Pegawai Kantor Camat Kecamatan Labuhanhaji Barat



Foto Dengan Kepala BPP Kecamatan Labuhanhaji Barat



Foto Bersama Petani



Foto Bersama Petani



Saluran Irigasi di Desa Pantan Pawoh